

PENERAPAN PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MELALUI DIPLOMASI MARITIM

Indrawati, Agung Yudhistira Nugroho
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
in.indrawati17@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to analyze how Indonesia explores maritime resources as an instrument of Indonesian diplomacy. Indonesia's diplomacy remains within the framework of Indonesia's foreign policy principles. Indonesia applies the principle of free and active foreign policy which it has done since the beginning of Indonesian independence. Indonesian maritime diplomacy strives to achieve a level of national interest that will allow it to become the world's maritime axis. To achieve this, Indonesia has joined several strategic partnerships that are concerned about and discuss maritime issues. The partnerships that Indonesia is involved in are trying to solve maritime problems. The data collection process for this paper was conducted using library research and secondary data supported by interviews with related parties. This research is very useful to understand how Indonesia carries out its foreign policy based on the principle of being free and active through diplomacy. Indonesia's cooperation in the maritime field has become a tangible form of Indonesian diplomacy.

Keywords: Foreign policy, diplomacy, maritime diplomancy, free and active foreign policy, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak di antara benua dua benua, Asia dan Australia serta dua samudera. Posisi ini membuat Indonesia menjadi sangat strategis. Kepemilikan kurang lebih 17.499 pulau menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia.¹

Pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, mendorong Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia. Visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia sendiri juga telah didukung oleh berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah menawarkan dana bantuan sebesar 40 miliar dollar AS kepada pemerintah Indonesia guna

mewujudkan visi Indonesia Poros Global Maritim.²

Konvensi *UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea)* merupakan salah satu ajang dimana peran Indonesia sebagai negara maritim dalam kancan internasional terlihat. Keistimewaan negara kepulauan dalam hukum internasional khususnya hukum laut internasional telah berhasil dibawa oleh Indonesia. Pada tahun 1982 Wawasan Nusantara diadopsi ke dalam konvensi *UNCLOS* dengan sebutan konsep negara kepulauan atau *archipelagic state concept*.³ Keberhasilan memasukkan konsep Negara kepulauan ini kemudian mendorong Indonesia untuk meratifikasi *UNCLOS* pada

1 Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015, October 28). *Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia*. Retrieved from <https://bphn.go.id/news/2015102805455371>

² Tawakal, M. I. (2015, March 9). *Menyusun strategi diplomasi maritim*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/tautawtau/54fd193fa333117e3350f826/menyusun-strategi-diplomasi-maritim>

³ Saleh, M. (2009). Aspek hukum internasional mengenai peperangan di wilayah laut negara kepulauan. *Jurnal Hukum*, 123-146.

tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.⁴

Indonesia menerapkan lima pilar utama untuk menjadi poros maritim dunia, yaitu: *pertama*, membangun budaya maritim; *kedua*, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; *ketiga*, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim; *keempat*, kerja sama maritim melalui diplomasi; *kelima*, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Kelima pilar tersebut disampaikan oleh Presiden Indonesia, Jokowi dalam KTT ke-9 Asia Timur yang diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar, November 2014.⁵

Diplomasi maritim yang diterapkan Indonesia melalui kelima pilar tidak dapat lepas dari politik luar negeri Indonesia. Terlebih politik luar negeri merupakan perwujudan dari kepentingan negara terhadap hubungan internasional. Indonesia telah menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal kemerdekaan. Konsep luar negeri bebas aktif tersebut masih diterapkan hingga saat ini. Meskipun Indonesia telah berganti kepemimpinan dan pemerintahan, Pada dasarnya, prinsip politik luar negeri “Bebas, Aktif” tidak banyak mengalami perubahan ditengah perubahan pemimpin di Indonesia. Pada masa Soekarno, “Bebas-Aktif” di gambarkan dengan “mendayung diantara dua karang” seperti yang disampaikan oleh Mohammad Hatta. Pada masa SBY, prinsip “Bebas-Aktif” digambarkan dengan “*Navigating in the Turbulance Ocean*”. Pada termin kedua pemerintahan SBY, prinsip “Bebas- Aktif”

bertransformasi menjadi “*Thousand Friends Zero Enemy*.”⁶

Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif ditujukan untuk mencapai kepentingan Indonesia guna menjadi poros maritim dunia. Dengan prinsip yang sudah ada tersebut lalu bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan dalam diplomasi maritim Indonesia?

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori, yaitu politik luar negeri dan Diplomasi Maritim.

1. Politik Luar Negeri

Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah :

“Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintahan Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”

Politik Luar Negeri erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.⁷ Rumusan politik luar negeri setiap negara berbeda, bergantung dari kepentingan nasionalnya masing-masing. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai tindakan/ perilaku/ kebijakan suatu Negara untuk mencapai

⁴ Sunardi, L. (2015, February 2). *Diplomasi maritim: RI ratifikasi seluruh perjanjian*. Retrieved <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150202/98/397700/diplomasi-maritim-ri-ratifikasi-seluruh-perjanjian>

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Pernyataan pers tahunan menteri luar negeri Republik Indonesia 2015*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/Documents/PPTM%202015/PPTM%202015%20indo%20final.pdf>

⁶ Setiawati, D. S. (2013). Relevansi politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam tatanan arsitektur perubahan tatanan politik internasional. *Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif*, 11. Yogyakarta, Indonesia: Institute of International Studies.

⁷ Brown, C. (2001). *Understanding international relations*. London, England: Palgrave.

kepentingan nasional yang ditujukan keluar.⁸

Politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasional ke dalam masyarakat antar bangsa.⁹ Rosenau, mengatakan bahwa politik luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk Negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dilingkungannya.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan dalam upaya mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara lain serta badan-badan internasional.

2. Diplomasi Maritim

Diplomasi digunakan sebagai alternatif hubungan antar Negara selain daripada perang. Diplomasi pada prinsipnya sangat berkaitan erat dalam pelaksanaan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi merupakan alat bagi negara untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Diplomasi sendiri adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan.

⁸ Dawisha, A. (1983). *Islam in foreign policy*. London, England: Cambridge.

⁹ Sabir, M. (1987). *Politik bebas aktif*. Jakarta, Indonesia: CV. Hji Masaung.

¹⁰ Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.

Bentuk-bentuk penggunaan alat diplomasi oleh negara seperti kebudayaan yang kemudian disebut dengan diplomasi kebudayaan, *soft power*, kekuatan publik, ekonomi serta maritim. Dalam hal mencapai kepentingan untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia menggunakan diplomasi maritim.

Diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui domain kelautan, dalam artian menggunakan aset-aset kelautan yang dimiliki untuk mengelola hubungan internasional.¹¹ Diplomasi maritim dapat dibagi menjadi *cooperative, persuasive and coercive* diplomasi maritim.

Diplomasi maritim dapat dilakukan dengan memanfaatkan aset-aset kelautan maupun kekuatan kelautan. Diplomasi maritim dapat dilakukan dengan misi seperti mengunjungi pelabuhan, latihan bersama, pelatihan dan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.¹²

Indonesia sebagai negara maritim terbesar dunia, memiliki aset-aset kelautan yang terpapar dari Sabang hingga Merauke. Aset yang dimiliki Indonesia lebih kepada sumber-sumber alam. Sumber atau kekuatan militer kelautan yang dimiliki Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri masih lemah. Untuk itu, Indonesia lebih condong dalam memanfaatkan aset-aset alam, jalur perairan serta kedaulatan maritim.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan metode pengumpulan data *study literature*, yaitu penulis mengolah informasi yang terdapat disumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, penelitian

¹¹ Le Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century*. New York, NY: Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780203555590>

¹² Le Mière, C. (2014).

terdahulu, berita dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Pembahasan

1. Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri sejatinya dijalankan untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam upaya pencapaian kepentingan nasional tersebut, pelaksanaan politik luar negeri setiap negara dilandaskan pada prinsip-prinsipnya masing-masing. Prinsip politik luar negeri merupakan pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri setiap negara.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *pertama*, landasan Ideologi yang dalam hal ini adalah Pancasila. Mohammad Hatta memperkuat kedudukan Pancasila sebagai landasan Ideologi politik luar negeri. Kelima sila yang ada dalam pancasila memuat pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal mencakup seluruh sendi kehidupan manusia.¹³ Pancasila sebagai dasar Negara bersifat mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam kegiatan politik negara.

Kedua, Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pembukaan UUD 1945 memperjelas UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. UUD memuat garis-garis besar kebijakan luar negeri Indonesia dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal-pasal yang termuat dalam batang tubuh UUD yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Ketiga, adalah landasan operasional. Landasan operasional berkenaan dengan

bagaimana landasan dan prinsip Politik Luar Negeri dapat diwujudkan sebagai realisasi dari sifatnya yang idealis menjadi normatif yang tertuang dalam bentuk ketentuan atau Undang-Undang. Perwujudannya sendiri akan berubah-ubah tergantung pada periode pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai pada masa tersebut.

Indonesia menetapkan prinsip politik luar negeri Indonesia dengan prinsip “bebas-aktif”. Dalam pidato “Mendayung di antara Dua Karang”, prinsip bebas aktif ini pertama kali diperkenalkan oleh Mohammad Hatta.

Pidato Hatta, memuat prinsip politik luar negeri Indonesia yang lahir ditengah pertarungan dua blok besar. Menyikapi pertarungan dua kekuatan besar tersebut, Indonesia mengusung prinsip politik luar negeri Indonesia ‘bebas, aktif’. Menurut Mochtar Kusumaatmaja sendiri “bebas” adalah Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif.¹⁴

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas, Aktif” ini juga telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, prinsip politik luar negeri “Bebas, Aktif” tidak banyak mengalami perubahan ditengah perubahan pemimpin di Indonesia. Namun Implementasi dan penggambaran dari prinsip “Bebas, Aktif” yang mengalami transformasi dari setiap kepemimpinan. Masa pemerintahan Soekarno, “Bebas-Aktif” di gambarkan dengan “mendayung diantara dua karang”, dimana “bebas”

¹³ Wuryandari, G. (2008). *Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran politik domestik*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

¹⁴ Kusumaatmaja, M. (1983). *politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya dewasa ini*. Bandung, Indonesia: Alumni.

diartikan dengan bebas dari penjajahan dan tidak memihak blok manapun dan “aktif” diartikan dengan aktif mengupayakan perdamaian dunia.

Makna bebas aktif mengalami transformasi, seiring dengan bergantinya pemerintahan. Masa pemerintahan Soeharto, “bebas” diartikan dengan tidak memihak kekuatan-kekuatan dunia dan “aktif” diartikan dengan melawan imperialisme dan kolonialisme serta aktif dalam Gerakan Non Blok, PBB dan ASEAN.¹⁵

Masa Habibie, Gusdur, Megawati hingga SBY, makna “bebas aktif” tidak banyak mengalami perubahan. “bebas” dimaknai dengan tidak terikat dengan ideology negara lain, dan “aktif” dimaknai dengan aktif dalam berbagai kerja sama baik bilateral maupun multilateral. Prinsip “bebas-aktif” pada masa SBY digambarkan dengan “*Navigating in the Turbulance Ocean*” dan “*Thousand Friends Zero Enemy*.”¹⁶

Prinsip politik luar negeri Indonesia yang telah dijalankan sejak lama tersebut masih dipertahankan di era pemerintahan Jokowi. Menteri Luar Negeri Indonesia juga menyatakan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia masih menganut prinsip bebas-aktif. Bebas dalam artian komitmen Indonesia untuk bebas menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia. Aktif dalam artian aktif berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia.¹⁷

¹⁵ Yani, Y. M., & Montratama, I. (2017). *Quo vadis politik luar negeri Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT. Elex Media Komputindo.

¹⁶ Setiawati, S. M. (2013). Relevansi politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam tatanan arsitektur perubahan tatanan politik internasional. *Seminar Refleksi 65 Tahun Politik Luar negeri Indonesia Bebas Aktif*, 1. Yogyakarta, Indonesia: Institute of International Studies.

¹⁷ Yani, Y. M., & Montratama, I. (2017).

Prinsip politik luar negeri “bebas-aktif” dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi, yakni “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Berdasarkan visi mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional tersebut terlihat makna “bebas”. Didalamnya juga termaktub sikap dan sifat “aktif” untuk dapat merealisasikan kemandirian nasional atas landasan kerja sama positif dan konstruktif yakni gotong-royong.¹⁸

Politik luar negeri Indonesia diimplementasikan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Salah satu kepentingan Indonesia yang ingin dicapai pada masa pemerintahan Jokowi ini adalah di sektor kemaritiman. Kemaritiman menjadi agenda khusus yang diusung oleh pemerintahan Jokowi. Hal ini terlihat ketika konsep nawacita yang digalakkan oleh Presiden Jokowi yang sedikit banyak menempatkan konsep kemaritiman dalam agenda pemerintahannya.

Salah satu bentuk implementasi nawacita yaitu konsep tol laut. Tol laut yang akan dibangun oleh Joko Widodo dapat memperkuat hubungan laut antar wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tol Laut ini diharapkan dapat menjangkau pembangunan infrastruktur antar wilayah laut yang selama ini banyak terbengkalai. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang berbasis maritim banyak dapat tercapai dengan lebih tepat sasaran.

Pembangunan maritim Indonesia juga ditujukan untuk sektor perdagangan, dimana difokuskan pada pertumbuhan sektor perikanan yang selama ini masih kurang

¹⁸ Situmorang, M. (2015). *Orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/98738-ID-orientasi-kebijakan-politik-luar-negeri.pdf>

digalakkan dengan serius oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam bidang perairan baik itu transportasi laut, perikanan, maupun industri kelautan lainnya. Untuk itu pemerintah dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal inilah yang dilihat oleh Pemerintahan Joko Widodo sebagai “*abundant mines*” yang harus dieksplorasi dan ditingkatkan manfaat yang terkandung didalamnya karena dari sinilah potensi besar Indonesia dapat ditingkatkan. Sektor industri maritim Indonesia yang selama ini selalu mengaju pada industri perikanan luar negeri sudah saatnya beralih menjadi bentuk swadaya sendiri yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Indonesia dan dapat mendatangkan devisa yang besar bagi negara.

Mengacu pada landasan operasional dimana pemerintah disini melakukan peningkatan kerja sama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerja sama internasional, maka fokus pemerintah saat ini dalam mengubah arah diplomasi menjadi diplomasi maritim. Diplomasi maritim ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan di bidang industri maritim seperti pengolahan sumber daya lautan, ekspor perikanan, pertahanan maritim dan lain sebagainya.

2. Kepentingan Indonesia di Bidang Kemaritiman

Indonesia sering diibaratkan sebagai “*Sleeping Giant*”. Hal ini karena potensi kelautan Indonesia yang besar belum dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. Indonesia memiliki prospek ekonomi berbasis kelautan yang sangat potensial. Kekayaan laut Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai basis ekonomi kelautan disepanjang wilayah pesisir Indonesia. Wilayah Indonesia juga menjadi

tempat perlintasan jalur perdagangan internasional yang akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Tiongkok merupakan salah satu negara yang kemudian berinvestasi terhadap infrastruktur maritim Indonesia. Investasi Tiongkok ini tidak lain karena Indonesia merupakan jalur sutra perdagangan maritim bagi Tiongkok.

Pembangunan tol laut Indonesia dengan bantuan investasi dari negara luar berpotensi semakin memperlancar perdagangan baik domestik maupun internasional. Pembangunan tol laut ini menciptakan konektivitas yang tidak hanya meningkatkan interaksi ekonomi tetapi juga interaksi dibidang-bidang lain.

Pemerintahan Jokowi berupaya untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan memanfaatkan aset kemaritiman yang dimiliki. Poros Maritim Dunia merupakan pengakuan dunia bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang maju dan kuat. Menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia dapat menjadi acuan bagi negara-negara lain dibidang kemaritiman.

Posisi Indonesia sebagai lintas perdagangan internasional, memungkinkan mengalami kemajuan ekonomi. Nilai perdagangan dunia yang ditransportasikan melalui wilayah laut Indonesia sebesar US\$ 1.500 atau sekitar 70% dari total nilai perdagangan dunia.¹⁹ Potensi kemajuan ekonomi melalui maritim kemudian mendorong pemerintahan Jokowi untuk terus mencapai kepentingan maritim. Pemerintah Jokowi sendiri menargetkan adanya kemajuan dari negara tingkat menengah bawah dengan penghasilan per kapita penduduknya tahun 2015 US\$ 3.592 menuju negara tingkat penghasilan menengah atas dengan pendapatan per

¹⁹ Salim. (2017). *Konsep neogeopolitik maritim Indonesia abad 21, menjawab ancaman Zionis dan China*. Yogyakarta, Indonesia: Diandra Pustaka Indonesia.

kapita penduduknya mencapai US\$ 10.000 pada tahun 2045. Dengan kata lain, jika kebijakan poros maritim dunia tercapai sebagaimana diharapkan maka Indonesia mampu berdaulat dari segi perekonomian.²⁰

Menjadi poros maritim dunia selain akan memajukan bidang ekonomi juga akan memajukan bidang lain. Bidang lain yang akan maju melalui maritim adalah bidang pertahanan laut.

Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri dalam Diplomasi Maritim

Diplomasi merupakan alat bagi negara untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Jika politik luar negeri dikategorikan sebagai ‘subtansi hubungan luar negeri’, sementara diplomasi adalah ‘metode’ nya.²¹ Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dengan cara diplomasi maritim menjadi salah satu program penting pemerintah. Cara diplomasi maritim dilakukan dengan tujuan mencapai kepentingan Indonesia guna menjadi poros maritim dunia.

Potensi maritim yang dimiliki Indonesia, mendukung pencapaian poros maritim. Poros maritim dunia dapat mendorong Indonesia menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan.²²

²⁰ Nainggolan, P. P. (2015). Kebijakan poros maritim dunia Joko Widodo dan implikasi internasionalnya. *Politica*, 6(2) 167-190.

²¹ Roy, S. (1995). *Diplomasi*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.

²² Rahmawaty, A. (2014, December 24). *Peran poros maritim dunia dalam meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional*. Retrieved from <http://www.fkpmar.org/peran-poros-maritim-dunia->

Keseriusan pemerintah dalam melakukan diplomasi maritim juga dapat dilihat dari pidato Jokowi:

“Melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua”. (Presiden RI, Ir. Joko Widodo, 2014). (Setiadji, 2018)

Pada masa pemerintahan Jokowi, diplomasi maritim dilaksanakan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hal ini terlihat dari aktifnya Indonesia terlibat dalam forum-forum internasional berbagai bidang. Politik luar negeri bebas aktif juga kemudian memberi peran terhadap upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Prioritas Indonesia di bidang kemaritiman dicerminkan dalam rumusan Politik luar negeri. Politik Luar Negeri Indonesia yang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkan melalui 5 (lima) agenda aksi:²³

- a. Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia;
- b. Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan;
- c. Mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- d. Mengintensifkan diplomasi pertahanan, dan;
- e. Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar dan mendorong

dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional/

²³ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. *Program strategis*. Retrieved from <http://maritim.web.id/program-strategis>

penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.

Pelaksanaan diplomasi menggunakan aset maritim yang dimiliki Indonesia tetap dalam kerangka prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Instrumen dari pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia adalah dengan kemitraan strategis dan kerja sama.²⁴ Kemitraan strategis sendiri memiliki pola yang sama-sama menguntungkan yang umumnya juga bersifat bilateral maupun multilateral. Kemitraan dan kerja sama strategis tersebut terus dilaksanakan Indonesia dengan bebas.

1) Kerja Sama bilateral

Kerja sama bilateral dilakukan sebagai bentuk diplomasi Indonesia baik dengan negara tetangga maupun mitra strategis. Kerja sama bilateral Indonesia dibidang kemaritiman diantaranya:

a. Kerja Sama Kemaritiman Indonesia-Tiongkok

Kerja sama maritim antara Indonesia dan Tiongkok merupakan implementasi visi kemaritiman kedua negara. Pada pertemuan antara Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indriyono Soesilo di Jakarta pada 15 Juli 2015, kesepakatan kerja sama dapat dicapai. Isu yang diangkat dalam kerja sama ini adalah pengembangan IPTEK maritim, peningkatan kunjungan wisatawan dari China, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan galangan kapal serta kerja sama di bidang perikanan.²⁵

b. *Plan of Action on Maritime Cooperation, Indonesia-Australia*

Kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia dengan poin yang dibahas mulai dari ekonomi hingga penanggulangan terorisme.²⁶ Poin lain yang dibahas selain kejahatan transnasional juga mengenai penangkapan ikan secara illegal, mencegah serta merespon polusi lingkungan maritim dan manajemen risiko bencana maritim.²⁷

c. *Japan-Indonesia Maritime Partnership*

Kerja sama Indonesia dan Jepang dibidang kemaritiman ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2016. Dalam kerja sama ini fokus utamanya adalah kerja sama pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas dan investasi di sektor maritim.²⁸ Dalam kerja sama ini, Jepang mendorong pengembangan enam pulau terluar Indonesia sebagai pusat perikanan seperti Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang and Saumlaki.²⁹

d. Kerja Sama Maritim Indonesia-Selandia Baru

Kerja sama Indonesia-Selandia Baru telah resmi ditandatangani pada 24 Juli 2015 di Jakarta. Kerja sama ini berfokus pada isu energi panas bumi,

²⁴ Yani, Y. M., & Montratama, I. (2017).

²⁵ Junida, A. I. (2015, July 15). *Indonesia - Tiongkok rintis kerja sama maritim*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/507288/indonesia-tiongkok-rintis-kerja-sama-maritim>

²⁶ Mardiasuti, A. (2018, March 16). *Ini 9 poin kerja sama maritim Indonesia-Australia*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>

²⁷ Mardiasuti, A. (2018, March 16).

²⁸ Lisbet. (2017, January). Peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, 9(2). Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf

²⁹ Hurst, D. (2018, June 29). *Japan, Indonesia strengthen maritime ties amid 60th anniversary*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2018/06/japan-indonesia-strengthen-maritime-ties-amid-60th-anniversary/>

pariwisata bahari dan iptek kelautan.³⁰

e. Kerja Sama Indonesia dan India

Pada tahun 2015, Indonesia dan India telah berhasil melaksanakan enam kerja sama maritime. Keenam kerja sama tersebut diantaranya latihan gabungan kemaritiman multilateral, latihan gabungan militer bilateral, patroli gabungan, kunjungan kapal. India ke Indonesia, kunjungan kapal Indonesia ke India, dan perjanjian pertahanan dan keamanan maritim.³¹

Selain kerja sama bilateral yang telah dijelaskan tersebut, masih ada beberapa kerja sama bilateral lain Indonesia di bidang maritim seperti Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan, Kerja Sama Indonesia- Rusia, Indonesia- Inggris, Indonesia- Italia, Indonesia- Belanda, Indonesia- Filipina, dan masih ada beberapa kerja sama dengan beberapa negara lain terkait kemaritiman. Kerja sama Indonesia dengan berbagai negara tersebut bertujuan untuk turut memecahkan masalah-masalah internasional yang berkaitan dengan kemaritiman. Masalah-masalah yang dibahas dalam berbagai kerja sama tersebut seperti kejahatan transnasional diwilayah laut, penangkapan ikan secara ilegal, potensi bencana, polusi lingkungan, dll.

2) Kerja Sama Multilateral

a. Indian Ocean Rim Association (IORA)

IORA merupakan organisasi regional di wilayah Samudera Hindia yang

memiliki peran strategis dibidang ekonomi yang menghubungkan perdagangan internasional dan Asia ke Eropa serta sebaliknya. Pilar kerja sama IORA terdiri dari ekonomi, keamanan dan keamanan maritim, dan pendidikan serta kebudayaan.³²

b. Trilateral Maritime Patrol Indomalphi

Merupakan kerjasama trilateral atau tiga negara antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dalam kerja sama ini isu utamanya adalah keamanan laut dimana ketiga negara tersebut melakukan patroli maritim bersama dimulai pada bulan Oktober 2017 yang mencakup patroli udara dan patroli kelautan.

c. International Coral Reef Initiative (ICRI)

Indonesia bersama Australia dan Monako dipercaya menjadi Ketua Bersama Sekretariat pada Desember 2017. ICRI merupakan kemitraan global terkait Terumbu Karang yang beranggotakan 38 negara termasuk Indonesia.³³

d. Kerjasama Kemaritiman ASEAN-RRT

Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal utama terkait kerja sama kemitraan ASEAN-RRT yaitu:³⁴

30 Aurelio. (2015, July 27). *RI - Selandia Baru kerja sama bidang maritim khusus*. Retrieved from <http://www.batasnegeri.com/ri-selandia-baru-kerjasama-bidang-maritim-khusus/>

31 Kurniawan, D., & Puspitasari, I. (2017). Hedging maritim Indonesia di tengah persaingan strategis India-China. *Indonesian Perspective*, 2(2), 85-103.

32 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Indian Ocean Rim Association*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IOA.aspx>

33 Rahman, M. (2018, July 3). *Menteri susi: Kepemimpinan ICRI bentuk diplomasi maritim*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/723753/menteri-susi-kepemimpinan-icri-bentuk-diplomasi-maritim>

34 Ditjen KSA. (2014, November 14). *Presiden Jokowi tekankan kerja sama ekonomi dan maritim dalam kemitraan ASEAN-RRT*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Tekankan-Kerja-Sama-Ekonomi-dan-Maritim-dalam-Kemitraan-ASEAN-RRT.aspx>

- Pentingnya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat ditujukan pada peningkatan kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, investasi yang berkualitas, dan perdagangan yang adil;
 - Pentingnya pembangunan infrastruktur regional. Investasi dalam pembangunan jalan, *deep-sea port*, zona industri, serta pasar tradisional, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN dan kebutuhan masyarakat; dan
 - Pentingnya peningkatan kerja sama di bidang konektivitas, termasuk konektivitas maritim. Dalam kaitan ini, Indonesia menyambut baik Tahun Kerja Sama Maritim ASEAN-RRT 2015.
- e. Indonesia memprakarsai dan memperkuat kerja sama regional di Asia Timur di bidang maritim melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur pada 21-22 November 2015.
- f. Indonesia mendorong kerja sama maritim dalam pertemuan D-8 yang diselenggarakan pada 20 Oktober 2017. D-8 merupakan kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Nigeria, Mesir dan Turki.³⁵

Selain dari berbagai kerja sama diatas, Indonesia juga terlibat dalam berbagai kerja sama kemitraan yang bersifat multilateral di bidang kemaritiman lain seperti *Heads of Asian Coast Guard agencies Meeting (HACGAM)*, *Indonesia Maritime Partnership Initiative* bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan dan Singapura.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia serta kepemilikan wilayah laut dan pulau yang luas menjadikan daya tawar tersendiri dalam hubungan internasional. Kepemilikan aset kelautan menjadikan Indonesia bertujuan untuk menjadi poros maritim dunia. Pengakuan dunia kepada Indonesia sebagai poros maritim tentunya memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia sendiri. Tujuan menjadi poros maritim dunia tersebut mendorong Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi dengan memanfaatkan aset maritim yang dimiliki. Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi konsep politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan Indonesia.

Prinsip Politik Luar Negeri bebas aktif dijalankan dengan diplomasi maritim yang tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Implementasi tersebut kemudian terlihat salah satunya dari keaktifan Indonesia dalam forum-forum internasional yang bersifat kemaritiman. Prinsip yang telah ada ini di tengah era globalisasi justru mendorong pencapaian kepentingan nasional. Kerja sama kemitraan Indonesia baik bilateral maupun multilateral bebas dilakukan dengan negara manapun terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia. Kerja sama maritim yang dilakukan Indonesia juga turut aktif dalam penyelesaian berbagai masalah dunia seperti ekonomi, pertahanan dan keamanan.

³⁵ Almanar, A. (2017, October 18). *Indonesia to push maritime partnerships at d-8 summit in Istanbul*. Retrieved from <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-to-push-maritime-partnerships-at-d-8-summit-in-istanbul/>

REFERENCES

- Almanar, A. (2017, October 18). *Indonesia to push maritime partnerships at D-8 Summit in Istanbul*. Retrieved from <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-to-push-maritime-partnerships-at-d-8-summit-in-istanbul/>
- Aurelio. (2015, July 27). *RI - Selandia Baru kerja sama bidang maritim khusus*. Retrieved from <http://www.batasnegeri.com/ri-selandia-baru-kerjasama-bidang-maritim-khusus/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015, October 28). *Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia*. Retrieved from <https://bphn.go.id/news/2015102805455371>
- Barston, R. (1988). *Modern diplomacy*. Singapore: Longman Singapore.
- Brown, C. (2001). *Understanding international relations*. London, England: Palgrave.
- Coplin, W. (1992). *Pengantar politik internasional: Suatu telaah teoritis*. Bandung, Indonesia: Sinar Baru.
- Dawisha, A. (1983). *Islam in foreign policy*. London, England: Cambridge.
- Diamond, L. (1996). *Multi-track diplomacy a system approach to peace* (3rd ed.). New York, NY: Kumarian Press.
- Ditjen KSA. (2014, November 14). *Presiden Jokowi tekankan kerja sama ekonomi dan maritim dalam kemitraan ASEAN-RRT*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Tekankan-Kerja-Sama-Ekonomi-dan-Maritim-dalam-Kemitraan-ASEAN-RRT.aspx>
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara teori dan praktik*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Djuanda, W. (1999). *Kamus hubungan internasional*. Bandung, Indonesia: Putra A. Bardin.
- Hadari, N. (2005). *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Hatta, M. (1976). *Mendayung antara dua karang*. Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang.
- Hurst, D. (2018, June 29). *Japan, Indonesia strengthen maritime ties amid 60th anniversary*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2018/06/japan-indonesia-strengthen-maritime-ties-amid-60th-anniversary/>
- Junida, A. I. (2015, July 15). *Indonesia - Tiongkok rintis kerja sama maritim*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/507288/indonesia-tiongkok-rintis-kerja-sama-maritim>
- Keliat, M. (2009). Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 111-129.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. *Program strategis*. Retrieved from <http://maritim.web.id/program-strategis>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2015*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/Documents/PPTM%202015/PPTM%202015%20indo%20final.pdf>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Indian Ocean Rim Association*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx>
- Kurniawan, D., & Puspitasari, I. (2017). Hedging maritim Indonesia di tengah persaingan strategis India-China. *Indonesian Perspective*, 2(2), 85-103.
- Kusumaatmaja, M. (1983). *Politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya dewasa ini*. Bandung, Indonesia: Alumni.

- Le Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century*. New York, NY: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203555590>
- Leifer, M. (1986). *Politik luar negeri Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia.
- Lisbet. (2017, January). Peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang. *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, 9(2). Retrieved from
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf
- Mardiastuti, A. (2018, March 16). *Ini 9 poin kerja sama maritim Indonesia-Australia*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>
- Nainggolan, P. P. (2015). Kebijakan poros maritim dunia Joko Widodo dan implikasi internasionalnya. *Politica*, 6(2) 167-190. Retrieved from
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/312>
- Odell, J. S. (Ed.). (2006). *Negotiating trade: Developing countries in the WTO and NAFTA*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511491610>
- Pamungkas, W. T. (2018, June 4). *Diplomasi maritim Indonesia dalam mengatasi perompakan di laut (Maritime Piracy)*. Retrieved from <https://medium.com/over-the-world/diplomasi-maritim-indonesia-dalam-mengatasi-perompakan-di-laut-maritime-piracy-3eb5933eb8f7>
- Pasopati, G. (2015, March 24). *Jokowi dan Shinzo Abe sepakati forum maritim*. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150324030119-92-41322/jokowi-dan-shinzo-abe-sepakati-forum-maritim/>
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, M. (2018, July 3). *Menteri Susi: Kepemimpinan ICRI bentuk diplomasi maritim*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/723753/menteri-susi-kepemimpinan-icri-bentuk-diplomasi-maritim>
- Rahmawaty, A. (2014, December 24). *Peran poros maritim dunia dalam meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional*. Retrieved from
<http://www.fkpmar.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional/>
- Rosenbaum, N. (1984). [Review of the book *International politics, a framework for analysis*, by K. Holsti]. *International Journal*, 23(1), 142-143.
<https://doi.org/10.2307/40199827>
- Roy, S. (1991). *Diplomasi*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.
- Roy, S. (1995). *Diplomasi*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif*. Jakarta, Indonesia: CV. Hji Masaung.
- Saleh, M. (2009). Aspek Hukum Internasional mengenai peperangan di wilayah laut negara kepulauan. *Jurnal Hukum*, 123-146.
- Salim. (2017). *Konsep neogeopolitik maritim Indonesia abad 21, menjawab ancaman Zionis dan China*. Yogyakarta, Indonesia: Diandra Pustaka Indonesia.
- Setiadji, A. (2017, May 17). *Diplomasi maritim untuk kedaulatan Indonesia*. Retrieved from
<http://maritimnews.com/2017/05/diplomasi-maritim-untuk-kedaulatan-indonesia/>

- Setiawati, D. S. (2013). Relevansi politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam tatanan arsitektur perubahan tatanan politik internasional. *Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif*, 11. Yogyakarta, Indonesia: Institute of International Studies.
- Setiawati, S. M. (2013). Relevansi politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam tatanan arsitektur perubahan tatanan politik internasional. *Seminar Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif*, 1. Yogyakarta, Indonesia: Institute of International Studies.
- Situmorang, M. (2015). *Orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/98738-ID-orientasi-kebijakan-politik-luar-negeri.pdf>
- Sulistiyangtyas, T., Susanto, & Munaf, D. R. (2015). Sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Sunardi, L. (2015, February 2). *Diplomasi maritim: RI ratifikasi seluruh perjanjian*. Retrieved <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150202/98/397700/diplomasi-maritim-ri-ratifikasi-seluruh-perjanjian>
- Sutisna, D. H. (2012, July 20). *Potensi ekonomi kelautan mampu menyejahterakan rakyat Indonesia*. Retrieved from <http://www.dekin.kkp.go.id/?q=news&id=20120802100908355974768552433825750659740299>
- Tawakal, M. I. (2015, March 9). *Menyusun strategi diplomasi maritim*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/tautawtau/54fd193fa333117e3350f826/menyusun-strategi-diplomasi-maritim>
- Wirayuda, H. (2007). *Refleksi tahun 2006, proyeksi tahun 2007*. Jakarta, Indonesia: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
- Wuryandari, G. (2008). *Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran politik domestik*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2017). *Quo Vadis politik luar negeri Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT. Elex Media Komputindo.